

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Evaluasi Etos Kerja Pegawai Negeri Sipil Mantan Rehabilitasi Narkoba di Pemerintahan Kota Binjai

¹Rahmadansyah, ²Endang Wirjatmi Lestari, ³Abdul Rahman

¹Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai

^{2,3}STIA LAN Bandung

e-mail: ¹rahmadansyahst1@gmail.com, ²wirjatmi01@yahoo.com, ³rhnoke@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Pemerintah tentang PNS yang terlibat penyalahgunaan narkoba melaporkan diri kepada atasan atau institusi yang berwenang agar segera difasilitasi untuk direhabilitasi narkoba. Kebijakan ini bertujuan agar PNS bebas dari ketergantungan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap PNS mantan rehabilitasi narkoba di Pemerintahan kota Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara terbuka, dokumentasi, dan observasi langsung kepada narasumber dengan melibatkan 4 narasumber. Data hasil wawancara kemudian dianalisis dan kemudian disimpulkan. Hasil dari penelitian dari evaluasi etos kerja PNS mantan rehabilitasi narkoba, masih memiliki sifat mental yang tidak stabil, mudah stres, dan belum bisa menyelesaikan masalah yang berat. Ajaran agama yang diberikan tidak berkesinambungan. Pengawasan dan pembinaan satu arah. Pengawasan dan pembinaan dilakukan satu arah.

Kata Kunci: Evaluasi Etos Kerja, Pegawai Negeri Sipil Mantan Rehabilitasi Narkoba.

Evaluation of Work Ethics of Former Civil Servants for Drug Rehabilitation in Binjai City Government

Abstract

The government policy regarding civil servants who are involved in drug abuse states that they must report themselves to their superiors or authorized institutions so that they are immediately facilitated to be rehabilitate from drug addiction. This policy aims to make civil servants free from drug addiction. This research aims to evaluate the former drug-abusing civil servants Binjai City government. The data were obtained through open interviews, document reviews, and direct observation to the resource persons by involving 4 speakers. The data obtained from the interviews were then analyzed and concluded. The research results after evaluating the work ethic of former drug-abusing civil servants showed that the civil servants still had unstable mental attitudes, easily felt stressed, and were not able to solve a tough problem. The religious teachings given to them were not sustainable. The supervision, monitoring, and guidance to them were conducted in one-direction mechanism.

Keywords: *civil servants, Evaluation of Work Ethics*

A. PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena global yang sangat menakutkan dan dapat mengancam bagi bangsa dan negara. Saat ini, penggunaan narkoba telah merambah luas di seluruh lapisan masyarakat termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan dan memiliki dampak

buruk terhadap si pengguna berupa ketergantungan yang membahayakan perilaku dan kesehatan serta dapat berujung kematian apa bila digunakan secara rutin dalam jangka waktu yang lama.

Keterlibatan PNS melakukan penyalahgunaan narkoba tentu tidak sesuai dengan program pemerintah, yaitu program

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang mewajibkan kepada semua Pegawai Negeri Sipil untuk disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan etos kerja Pegawai Negeri Sipil dan mengamalkan nilai-nilai dasar, kode etik dan kode prilaku sebagai ASN.

Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dijelaskan adanya kewajiban pecandu narkoba melaporkan diri kepada fasilitas kesehatan atau lembaga rehabilitas medis dan sosial untuk menjalani pengobatan dan perawatan dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan menjamin penyalahgunaan narkoba yang ditangkap penyidik narkotika di hukum rehabilitasi.

Selanjutnya sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan kriteria jelas antara penyalahguna dan pengedar narkotika. Dalam konteks viktimologi, memposisikan penyalahguna narkotika sebagai korban dalam keadaan sakit ketergantungan kronis yang memerlukan rehabilitasi.

Peredaran narkoba bukan hanya terjadi di satu wilayah atau sebagian wilayah di Indonesia saja, tetapi seluruh wilayah Indonesia sudah terkontaminasi dengan penyebaran narkoba termasuk wilayah propinsi Sumatera Utara. Peredaran dan pengguna narkoba di Sumatera Utara (Sumut) terus meningkat sejak tahun 2013 hingga 20%, meskipun penindakan berupa penangkapan terus dilakukan. Adapun peringkat 4 besar penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di daerah kabupaten/kota di wilayah propinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Kota Medan,
2. Kota Binjai
3. Kota Siantar
4. Kota Tebing Tinggi.

Pada tahun 2017 terdapat 28 kasus peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Kota Binjai dan 4 kota tersebut merupakan jalur lintas yang sangat rawan terhadap peredaran narkoba, hampir setiap

kasus narkoba yang terjadi merupakan jalur lintas sebagai jalur penghubung antar daerah dan perbatasan kota yang tidak terjangkau dari pengawasan aparat keamanan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara preventif dan represif, dengan saran apenal dan non penal. Upaya preventif yang dilakukan dengan cara melalui razia rutin dan pemasangan reklame tentang bahaya narkotika disetiap instansi pemerintah dan upaya represif melalui penindakan hukum tegas bagi pegawai PNS yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya Pemerintahan Daerah Kota Binjai yang merupakan salah satu Kota yang berada di Propinsi Sumatera Utara, merupakan kota terbesar kedua peredaran dan penyalahgunaan narkoba di propinsi Sumatera Utara, tak luput dari permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan PNS. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus PNS di Pemerintahan Kota Binjai yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Adapun kasus-kasus PNS yang ada di kota Binjai terlibat penyalahgunaan narkoba, yaitu Adanya sejumlah PNS Kota Binjai yang tertangkap penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah kota Binjai kepada masyarakat. Ternyata situasi ini membuat Pemerintah kota Binjai terus berbenah dan akan membuat seluruh PNS diajarannya bebas dari narkoba. Sehingga Walikota Binjai mengeluarkan surat edaran Nomor : 800-1224 tertanggal 27 Februari 2017, menghimbau kepada seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemerintah kota Binjai sebagai pengguna narkoba akan segera melapor kepada instansi masing-masing agar di rehabilitasi ke tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah. Jika tidak melapor dan terlebih dahulu di tangkap oleh pihak berwajib akan dikenakan hukum pidana dan dilakukan pemecatan. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba dan membenahi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Binjai agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

1. Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Menurut Defenisi operasional Manajemen PNS bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (PP No11 tahun 2017).

Selanjutnya, Pegawai Negeri Sipil yang di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK.

Tujuan manajemen ASN yaitu: untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan Azas, Prinsip, Nilai Dasar, serta kode etik dan Prilaku ASN yang telah ditetapkan (UU ASN No.5 Tahun 2014).

Dalam menjalankan manajemen ASN setiap PNS haruslah memiliki karakter dan mental yang kuat. Dimana menurut (Tilaar dan Nugroho,2008:81) dalam (Supriatna, 2017:285) menyatakan Karakter adalah perangkat individual dari karakteristik psikologis yang mempengaruhi kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk berfungsi secara moral. Sedangkan karakter identik dengan mental. Secara etimologi kata mental berasal dari bahasa latin "*mens*" atau "*metis*", yang memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, roh, atau semangat. Jadi menurut Supriatna (2017:285) mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan psycho atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

Sebagai salah satu strategi dalam reformasi administrasi publik, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah memiliki

profesionalisme, etika dan budaya kerja. Sehingga harapan akan suatu kultur aparatur negara yang profesional dan akuntabel dapat tercapai. Dewasa ini negara Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan adanya persaingan antar negara yang tinggi, dengan adanya suatu kultur aparatur negara yang profesional dan akuntabel, Aparatur Sipil Negara dapat menghadapi setiap tantangan yang ada.

2. Etos kerja

Menurut Anoraga dalam Darajat (2015:76), "etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Bila individu-individu dalam komunitas memandang kerja sebagai suatu hal yang luhur bagi eksistensi manusia, maka etos kerjanya akan cenderung tinggi. Sebaliknya sikap dan pandangan terhadap kerja sebagai sesuatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, maka etos kerja dengan sendirinya akan rendah".

Jadi etos kerja sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara, dimana etos kerja merupakan cara pandang dan sikap yang positif masyarakat suatu bangsa terhadap kerja, sehingga mendorong masyarakat suatu negara untuk bekerja secara maksimal.

Prilaku yang positif yang dilaksanakan oleh seseorang atau suatu organisasi, telah menjadi komitmen bersama dalam peningkatan etos kerja, akan melahirkan sikap dan perilaku kerja mereka yang khas. Sehingga menjadi budaya kerja.

Hal ini diungkapkan oleh Sinamo dalam Darajat (2015:76), "etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Menurutnya, jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu komunitas menganut paradigma kerja, mempercayai, dan berkomitmen pada para digma kerja tersebut, semua itu akan melahirkan sikap dan perilaku kerja mereka yang khas. Itulah yang akan menjadi budaya kerja".

Dimana etos kerja adalah prilaku positif dari keyakinan seseorang dan menjadi komitmen untuk meningkatkan kinerja, sehingga menjadi budaya kerja.

Menurut Darajat (2015:77) bahwa "etos kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan, sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya”.

Jadi etos kerja adalah sikap atau cara pandang seseorang dalam menilai bekerja merupakan suatu hal yang positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang dapat mempengaruhi perilaku kerja. Kemudian, etos kerja haruslah didasari oleh nilai-nilai ataupun norma-norma tertentu yang dapat meningkatkan semangat kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Menurut Darodjat (2015:78), bahwa Etos kerja dipengaruhi oleh :

1. Agama
2. Budaya
3. Sosial Politik
4. Kondisi Lingkungan

menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Observasi dilakukan secara langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana etos kerja PNS mantan rehabilitasi Narkoba di Pemerintahan Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal terkait etos kerja PNS mantan rehabilitasi Narkoba di Pemerintahan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian bahwa peran agama sangat penting bagi PNS mantan rehabilitasi narkoba untuk dapat mengubah cara berpikir, sikap dan bertindak menjadi lebih baik. Pemberian ajaran agama dan melaksanakan kegiatan agama seperti : tausyiah (nasehat), pengajaran pembacaan alqur'an, sholat berjama'ah tepat waktu, kepada PNS yang baru selesai direhabilitasi sangat diperlukan, karena mental dan sikap

5. Pendidikan

6. Motivasi Intrik Individu

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sudjana dan Ibrahim (1989:3) dalam (Satori dan Komariah, 2011:21) Metode penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan

yang labil sangat mungkin tergoda untuk kembali. Disinilah peran agama dibutuhkan untuk menguatkan iman, mental, meneguhkan sikap untuk tidak kembali lagi memakai narkoba, melatih PNS mantan rehabilitasi narkoba untuk bersosialisasi pada lingkungan sekitar, dan melatih PNS mantan rehabilitasi narkoba untuk disiplin dan menghargai waktu.

Ajaran agama sangat berperan besar dalam diri seseorang untuk mengingat Allah sang pencipta semesta alam. Dengan bantuan Allah SWT 99% seseorang bisa keluar dari ketergantungan narkoba. Keinginan saja tidak cukup membuat seseorang keluar dari ketergantungan narkoba. Tanpa bantuan Allah SWT Sang Pencipta semesta alam, seseorang tidak akan bisa keluar dari ketergantungan narkoba.

Agama juga mengajarkan bahwa kerja merupakan rahmat dan amanah yang diAnalisa Etos Kerja dari Aspek Budaya Pegawai Negeri Sipil yang masih memakai narkoba memiliki tingkat disiplin yang buruk, tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada dirinya maupun orang lain. Selalu saja hari-harinya diisi dengan mengkonsumsi narkoba dan malas melakukan pekerjaan.

Peran budaya sangatlah penting bagi PNS mantan rehabilitasi narkoba untuk dapat mengubah cara berpikir, sikap dan bertindak menjadi lebih baik. Sementara itu di tempat kerja PNS mantan rehabilitasi narkoba menanamkan budaya yang dapat menguatkan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

PNS mantan rehabilitasi narkoba untuk tidak menggunakan lagi narkoba, seperti membuat slogan Aparatur negara yang bersih dan berprestasi yaitu aparaturnegara tanpa narkoba, serta kawasan hidup sehat dan bersih tanpa narkoba. Hal ini sejalan dengan slogan yang telah di buat oleh Bapak walikota Binjai yaitu ; Kawasan Bebas Narkoba, yang telah di pasang di rumah dinas Walikota Binjai, rumah dinas wakil walikota Binjai, dan kantor walikota Binjai.

Kemudian atasan langsung tempat kerja PNS mantan rehabilitasi narkoba menanamkan suatu budaya kerja sama antara sesama staf dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak membedakan antara PNS mantan rehabilitasi narkoba dengan staf yang tidak pernah direhabilitasi narkoba.

Untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan Pemerintah kota Binjai, walikota Binjai membuat Mou dengan Muspida Forum Forkopindo kota Binjai, tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kota Binjai, kemudian Pemerintah kota Binjai membuat Mou dengan BNN kota Binjai, tentang pelaksanaan test urine kepada setiap PNS di lingkungan Pemerintahan kota Binjai, dan Walikota Binjai mengeluarkan Surat Edaran Walikota Binjai bernomor 800-1224 Tahun 2017 yang isinya menghimbau PNS yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk melapor agar segera direhabilitasi jika tidak akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP no 53 Tahun 2010. Tindakan ini diambil bertujuan untuk menekan angka PNS pengguna narkoba dilingkungan Pemerintah kota Binjai.

Dalam menjalankan tugasnya Pegawai Negeri Sipil mantan rehabilitasi narkoba sebagai pimpinan di kelurahan tersebut melakukan kerjasama dengan Polmas, Babinsa, dan setiap kepala lingkungan, agar terciptanya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kebersihan juga tak luput dari perhatiannya. Setiap dua minggu sekali mengadakan gotong royong, dan mengadakan kerja sama dengan dinas kesehatan untuk melakukan fogging dalam pemberantasan nyamuk demam berdarah di kelurahan yang dia pimpin.

Pegawai Negeri Sipil mantan rehabilitasi narkoba mendapatkan kenaikan jabatan menduduki jabatan eselon III-b, dan di

promosikan kembali untuk menduduki jabatan eselon III-a sebagai kepala kantor di Pemerintah kota Binjai. Pada jabatan baru ini, PNS mantan rehabilitasi narkoba di perintahkan oleh walikota Binjai untuk membantu korban gempa di kabupaten Pidie jaya Profinsi NAD. Pegawai Negeri Sipil mantan rehabilitasi narkoba berada di kabupaten Pidie Jaya selama 2 minggu. Pegawai Negeri Sipil mantan rehabilitasi narkoba memimpin rekan-rekan kerja dari Pemerintah kota Binjai untuk membantu rekonstruksi korban gempa bumi di kabupaten Pidie Jaya. Kemudian PNS mantan rehabilitasi narkoba diperintahkan memimpin bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kota Binjai untuk pencarian korban tenggelamnya kapal feri di Danau Toba selama 2 minggu.

Selain itu, PNS mantan rehabilitasi narkoba membuat suatu inovasi berupa drum band Gita Idaman. Pembentukan drum band Gita Idaman ini mendapatkan respon yang positif dari walikota Binjai. Setiap latihan yang dijadwalkan 3x seminggu, PNS mantan rehabilitasi narkoba memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota drum band Gita Idaman, mengecek peralatan drum band yang digunakan, apakah masih layak digunakan, atau ada yang rusak. Jika ada peralatan drum band yang rusak akan segera di ganti dengan yang baru. Personel drum band Gita Idaman semuanya berasal dari staf kantor yang PNS mantan rehabilitasi narkoba pimpin.

Hampir semua pengguna narkoba awal mulanya tidak mengetahui bahaya menggunakan narkoba akan berdampak negatif bagi dirinya. Sehingga pada saat di tawari narkoba sama teman, mau saja mencoba barang haram tersebut.

Program sosialisasi yang efektif dan luas merupakan bagian yang penting dari tindakan penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan melalui sosialisasi sebagai sebuah proses berkesinambungan dengan tujuan untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Program sosialisasi diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah kota Binjai, sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bahaya narkoba di lingkungan Pemerintah kota Binjai.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Untuk meningkatkan keberhasilan program ini, kepala BKD kota Binjai meminta PNS mantan rehabilitasi narkoba memberikan sosialisasi dan menceritakan tentang pengalamannya pada saat memakai, di rehabilitasi, dan bagaimana beliau bisa lepas dari ketergantungan narkoba. Dengan kata lain PNS mantan rehabilitasi narkoba sebagai duta narkoba perpanjangan tangan dari Pemerintah kota Binjai. Dengan demikian PNS yang masih memakai narkoba mau direhabilitasi untuk pulih dan sembuh dari ketergantungan narkoba. Sehingga PNS pengguna narkoba menurun dan lingkungan Pemerintah narkoba bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan dari evaluasi etos kerja Pegawai Negeri Sipil mantan rehabilitasi narkoba diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil mantan rehabilitasi narkoba yang telah kembali bekerja, dua tahun pertama merupakan masa kritis dan masih memiliki mental yang labil, mudah stres, belum bisa menyelesaikan masalah yang berat, dan masih memiliki semangat kerja.

2. Pegawai negeri sipil korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan ajaran agama hanya pada saat mengikuti program rehabilitasi narkoba, belum adanya pemberian ajaran agama secara berkesinambungan kepada pegawai negeri sipil mantan rehabilitasi narkoba paska rehabilitasi narkoba.

3. Pengawasan dan pembinaan kepada pegawai negeri sipil mantan rehabilitasi

narkoba hanya dilakukan oleh atasan langsung pada saat di kantor saja, berupa penilaian SKP dan memantau setiap tingkah laku PNS mantan rehabilitasi narkoba, serta memberikan arahan pekerjaan dan melaksanakan olahraga gerak jalan setiap minggunya. Kemudian hasil dari pantauan dan penilaian SKP diberikan kepada bagian sekretariat

4. Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba hanya diberikan kepada pelajar dan masyarakat saja, kepada PNS di lingkungan Pemerintah kota Bandung belum dilakukan, serta tidak memberdayakan pegawai negeri sipil mantan rehabilitasi narkoba sebagai pembicara.

REFERENSI

Darodjat, Tubagus Achmad. 2015. Pentingnya Budaya Kerja Tinggi Dan Kuat Absolutte. Bandung; PT.Refika Aditama

Satori Djam'an dan Komariah Aan, 2011, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Alfa Beta.

Sulistiyani Teguh dan Rosidah, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia "Pendekatan Teoritik dan Praktik Untuk Organisasi Publik", Gava Media.

Tubagus Achmad Darodjat, 2015, "Pentingnya Budaya Kerja Tinggi dan Kuat : Absolut", Rafika Aditama.

Yuniarsih Tjutju dan Suwatno, Desember 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia "Teori, Aplikasi, dan Isu Penelitian", Alfabeta.

Andris Sarnovics, Tahun 2010, BA School of Business and Finance, Latvia, andris sarnovics@lais.lv